

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Iswiyati Rahayu

Lembaga Penelitian dan Pelatihan (LPPK) Lareca Mandiri Banjarmasin
Jln. Dahlia Gang Budaya RT 32bno 03Banjarmasin 70112, Tlp/Fax (0511) 3354978
Email : iswiyatiku@yahoo.co.id

Abstract: Implementation of Corporate Social Responsibility Program for the Operation of Society Welfare. This study aims to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) and its impact on the welfare of society. This research uses descriptive qualitative approach to generate data and information that reliable and valid. Techniques of data collection using interviews, observation and discussion of data sources is key informants taken with snowball sampling method of the enterprise, government and society. Data were analyzed using the interactive method. The results showed that the Program Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is not implemented optimally. Still found problems in economic development, land acquisition and environment that led to the conflict between the company, government and society.

Keywords: program implementation, social responsibility, community welfare, conflict.

Abstrak: Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data dan informasi yang reliabel dan valid. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan diskusi. Sumber data adalah informan kunci yang diambil dengan metode snowball sampling dari pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Data dianalisis menggunakan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan permasalahan dalam pengembangan ekonomi, pembebasan lahan dan lingkungan, sehingga memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: implementasi program, tanggungjawab sosial, kesejahteraan masyarakat, konflik.

PENDAHULUAN

Pada saat operasional penambangan batubara di Kalimantan Selatan dimulai pada tahun 1992, PT. Adaro telah membuat komitmen untuk bergabung bersama masyarakat dan membuat program masyarakat yang berkesinambungan yang menjadi dasar bagi anak perusahaan yang kegiatannya memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi dampak dan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang timbul di lingkungan masyarakat pedesaan yang kurang mampu yang ada di sekitar wilayah penambangan, sehingga pada

akhirnya akan memberi manfaat positif terhadap masyarakat tersebut baik selama kegiatan penambangan berlangsung maupun setelahnya. Dasar dari program tanggung jawab sosial ini adalah komunikasi, yaitu dengan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai seluruh rencana kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut. Dengan demikian, dapat dilakukan pengembangan struktur pendukung yang memastikan bahwa terjadi proses komunikasi dua arah dalam program pelayanan terhadap komunitas tersebut. Elemen uta-

ma dari program ini adalah pengembangan potensi masyarakat. Strateginya adalah dengan memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai karyawan. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan perusahaan telah mengubah masyarakat yang semula sebagian besar tanpa keahlian yang memadai, menjadi angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan. Hal ini telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kunci keberhasilan program pelayanan masyarakat PT. Adaro adalah adanya pengembangan dan peninjauan tahunan terhadap rencana yang mencakup pengembangan bisnis yang berbasis masyarakat, program-program pendidikan, keagamaan dan kesejahteraan sosial dan program-program lainnya, yang pada akhirnya menjadi program yang berkesinambungan. Termasuk dalam program pelayanan masyarakat adalah meningkatkan standar lingkungan hidup yang terbaik. Lahan yang dijadikan lokasi penambangan direklamasi sesegera mungkin dan diserahkan kepada masyarakat setempat. Proses pengembalian lahan adalah termasuk di dalamnya penanaman tanaman niaga, membuat peternakan ikan dan membangun tempat wisata. Proses ini juga digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan pelatihan pertanian. Pertambangan Batu-bara yang merupakan sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran hanya beberapa orang saja. Dengan demikian, Pemerintah sebagai pemegang amanah memberikan izin usaha pertambangan (KP) kepada pengusaha yang melakukan penambangan batu bara di Kalimantan Selatan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengusaha yang memenuhi persyaratan diberi ijin kuasa pertambangan batu bara di Kalsel. Menurut BPS Kalimantan Selatan (2012) saat ini terdapat 1.212 kuasa pertambangan yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 32 izin dari

pemerintah pusat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati Tabalong yang telah memiliki sertifikat CNC (*Clear and Clean*) ada 16 IUP.

Selanjutnya, hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto (2005) terhadap 375 perusahaan di Jakarta mengatakan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan tidak melakukan CSR dan sebanyak 209 atau 55,75% perusahaan yang melakukan CSR. Penelitian CPPS UGM dan UNDP tahun 2003 mencatat bahwa kehadiran perusahaan di IUP, selain meningkatkan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja, dan membuka daerah yang terisolir, juga menyebabkan terjadinya polusi air, udara, dan tanah; sengketa lahan dengan masyarakat setempat; serta menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan dan nonkaryawan. Persepsi negatif atas kehadiran perusahaan itulah yang berusaha dihapus dengan melaksanakan CSR. CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangat tergantung pada keinginan manajemen perusahaan itu sendiri dan perusahaan tambang batu bara berskala besar, yang mendominasi pertambangan di Tabalong rata-rata berdomisili di Jakarta dan bahkan kantor pusatnya di sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga ada diantara mereka yang masuk kategori yang tidak melaksanakan CSR. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan dampak pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara factual aksinya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep

investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Menurut Suharto (2008), dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* karya Elkington, et al., (1998), mengembangkan tiga komponen penting *Sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report* (1998), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga focus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Dalam perkembangannya, konsep CSR tidak memiliki definisi tunggal karena implementasi dan penjabaran CSR di berbagai perusahaan yang berbeda-beda. Menurut Warta Pertanian (2004), CSR adalah tanggungjawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan serta ekonomi.

Kepedulian sosial perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham, tetapi juga stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *The World Business Council for Sustainable Development* (2002), dalam publikasinya *Making Good Business Sense*

mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. (Adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat dan sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas). Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development (WCED)* Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi juga, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Definisi CSR tidak mempunyai definisi tunggal, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan pengertian, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan (*konsep economic sustainability*, *environment sustainability* dan *social-sustainability*). *Economic Sustainability* menurut *World Business Council for Sustainable Development* didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka. *Environment Sustainability* perusahaan harus mengacu kepada semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam hal ini perusahaan melaksanakan kegiatan yang meliputi: (a) melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan; (b) membuat perencanaan perusahaan yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan; (c) melakukan tindakan pencegahan terhadap dampak negatif bisnis perusahaan terhadap lingkungan; (d) melakukan peningkatan kinerja lingkungan secara terus-menerus; (e) mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan atas kebijakan lingkungan perusahaan dan atas persoalan-persoalan terkini yang berkaitan dengan lingkungan hidup; (f) memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan lingkungan.

Social Sustainability menurut Sulistyaningtyas (2006), *Social Sustainability* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stake-holders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut UUPT 2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada dasarnya adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi

si dalam pengembangan ekonomi, kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga mengembangkan kualitas komunitas dan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berupaya menghasilkan data dan informasi yang dapat dipercaya dan valid. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari *key informant* yang diambil dengan *metode snowball sampling* melalui pengamatan, diskusi, wawancara terhadap masyarakat maupun pihak pemerintah dan pihak perusahaan dan swadaya masyarakat. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, laporan pemerintah dan hasil penelitian peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode interaktif melalui proses:

- (a) Coding, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda dimaksud dapat berupa angka ataupun huruf.
- (b) Editing, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah ada kekeliruan dalam pengisian atau data yang ada masih kurang lengkap, palsu tidak sesuai dan sebagainya. Dengan editing diharapkan akan diperoleh data yang benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (c) Tabulating, terutama untuk data yang berbentuk angka dan penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagi data sekunder tidak dilakukan lagi pengolahan lebih lanjut karena data terse-

but telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

- (d) Data narasi sebagai data kualitatif yang bersumber dari data yang berbentuk jawaban berupa cerita atau argumentasi dari pedagang serta unit-unit kerja pemerintah yang terkait.
- (e) Penarikan kesimpulan dari variabel penelitian, sehingga dapat memberi penjelasan terhadap variabel lainnya.

HASIL

Pelaksanaan Program CSR

PT. Adaro menyadari bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menciptakan lingkungan sehat dan mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sekitar, seperti dikatakan *Deputy Corporate Secretary* Adaro Devindra Ratzarwin, di Tanjung, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perwujudan tanggungjawab sosial, menurut Davindra, seluruh kegiatan CSR tidak berorientasi pada pada hasil semata, tetapi lebih ditekankan terhadap pemberdayaan komunitas masyarakat lokal. CSR sekaligus juga mempersiapkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar pasca-kegiatan pertambangan, sehingga dapat diharapkan berkembangnya ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal. Anggaran CSR dialokasikan untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosio-kultural, anggaran operasional dan proyek khusus. Proyek khusus yang sudah berjalan antara lain program peternakan sapi, pembiakan unggas, dan tutorial untuk persiapan siswa lokal dalam ujian nasional. Wilayah binaan CSR itu melingkupi daerah terdekat dengan jalur tambang PT Adaro. Daerah tersebut antara lain meliputi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala) dan Kalimantan Tengah (Barito Selatan dan Barito Timur). Kedua perusahaan tersebut, menurutnya, akan memulai proyek minyak biodiesel dari *Jatropha* dan tanaman bahan baku lainnya yang ditanam di wilayah bekas tambang. Hasil dari pengolahan biodiesel

tersebut akan digunakan untuk mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar biodiesel.

Perubahan Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, kegiatan yang dikembangkan adalah sektor-sektor usaha yang memiliki kemampuan bersaing dan keunggulan tersendiri di masing-masing kabupaten. Pemberdayaan telah dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemandirian. Pengembangan tanaman karet menjadi fokus kegiatan agrikultural dengan cara perluasan lahan tanam dan peningkatan kualitas serta diversifikasi produk dalam usaha meningkatkan nilai tambah. Pengembangan ekonomi, PT. Adaro membiayai program koperasi di bidang pertanian dan industri perkebunan seperti karet dan minyak kelapa sawit. Selain itu juga PT. Adaro memberikan bantuan untuk proyek peternakan dan pembiakan unggas. Lebih lanjut Devindra menjelaskan, untuk sektor pertanian/perkebunan karet sepanjang 2008 dikembangkan program budidaya memperluas area perkebunan rakyat seluas 500 hektar. Mencakup binaan 615 rumah tangga tersebar di 20 desa. Dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, PT. Adaro mendukung Lembaga Pengembangan Bisnis Adaro-Pama yang telah menyediakan pelatihan untuk mendukung 743 pengusaha UMKM. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui pelatihan kewiraswastaan diarahkan untuk memperkuat kemampuan berbisnis masyarakat setempat melalui peningkatan kemampuan wirausaha, perbaikan produktivitas, teknologi, pembiayaan dan pemasaran. Di tahun 2008, PT. Adaro telah melakukan pelatihan untuk mendukung 743 pengusaha kecil dan menengah.

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diarahkan untuk penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan usaha rumah tangga untuk pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Sejak dimulainya lembaga ini di tahun 2005 sampai dengan 2008, total dana yang tersalur telah mencapai Rp

8,5 miliar, sedangkan di tahun 2008 total dana pinjaman adalah sebesar Rp 1,7 miliar dengan pendapatan bersih sebesar Rp 327 juta. Kegiatan pengembangan di bidang ekonomi lainnya antara lain meliputi budi daya tanaman sawit, tanaman sayur dan buah, serta perikanan. Termasuk juga dalam kegiatan ini adalah pengembangan bisnis pengolahan dan kerajinan rotan, industri rumah tangga penghasil gula merah, bengkel otomotif, serta balai kerja untuk industri kelistrikan. Lebih lanjut *Deputy Corporate Secretary* PT. Adaro Devindra Ratzarwin mengatakan, kegiatan yang dikembangkan juga meliputi sektor-sektor usaha yang memiliki kemampuan bersaing dan keunggulan tersendiri di masing-masing kabupaten. Pemberdayaan telah dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemandirian. Pengembangan tanaman karet menjadi fokus kegiatan agrikultural dengan cara perluasan lahan tanam dan peningkatan kualitas serta diversifikasi produk dalam usaha meningkatkan nilai tambah.

Program bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, moral dan nilai-nilai keagamaan. Program kualitas guru dan peningkatan manajemen lembaga pendidikan adalah salah satu fokus kerja untuk mencapai kualitas pendidikan yang setara dengan daerah maju. Bersama dengan pemerintah daerah dan penyedia bimbingan belajar (tutorial) pihak ketiga, sejak tahun 2006 PT. Adaro telah mengembangkan 31 tutor dan pelatih bersertifikasi. Para tutor dan pelatih ini diharapkan dapat memfasilitasi fasilitas pendidikan di masyarakat sekitar operasional penambangan. PT. Adaro bersama pihak ketiga penyedia jasa tutorial telah membantu lebih dari 1.800 pelajar untuk persiapan Ujian Akhir Nasional. Program tutorial ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelajar. Perpustakaan Keliling dikembangkan untuk memenuhi peningkatan minat baca para pelajar. Saat ini, Perpustakaan Keliling memiliki koleksi sebanyak 15.000 buku. Program beasiswa akan terus dikembangkan bagi para pelajar

yang kurang mampu dan peraihan beasiswa untuk memacu prestasi sekolah. Peningkatan dan penyediaan fasilitas pendidikan telah dilakukan secara bertahap dan terpusat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan program pendidikan di tahun 2008, menurut *Deputy Corporate Secretary* PT. Adaro Devindra Ratzarwin, PT. Adaro bersama dengan pihak kontraktor penambangannya melakukan pengujian baca cepat. Hasil tes menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam kemampuan membaca dari sebelumnya 162 kata per menit menjadi 661 kata per menit, dengan tingkat pemahaman dari semula 44% menjadi sebesar 66%. Juga, di tahun 2008, sebanyak 1.834 beasiswa telah diberikan kepada para pelajar di wilayah Tabalong, Balangan, Barito Selatan, Barito Timur dan Batola.

Lingkungan

Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan adalah fokus utama dalam penambangan dan operasional terminal dari unit operasional PT. Adaro Energy dimana standar, kebijakan, dan perencanaan lingkungan yang ketat diberlakukan di seluruh tahap operasi untuk memastikan bahwa dampak lingkungan diminimalkan. Lahan yang terkena dampak operasi direklamasi secepatnya dan dikembalikan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan bagi proyek pengembangan masyarakat. Program yang ketat untuk pengelolaan dan pengendalian udara, air, dan limbah merupakan bagian yang terpadu dari program pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan, dimana staf dan laboratorium lapangan dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk menangani seluruh aspek pengawasan dan analisa. Komitmen PT. Adaro Energy terhadap kebijakan ini akan menjamin perusahaan untuk memenuhi standar nasional dan internasional tertinggi untuk rehabilitasi lingkungan dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat lokal melalui integrasi proyek lingkungan dengan program pengembangan masyarakat. Sebagai bukti dari komitmen

Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan Lingkungan PT. Adaro

Kegiatan	2007	2008	2009
Rehabilitasi (hektar)	292,52	402,67	1.595,06
Lahan yang Terganggu – Tambang (hektar)	254,08	223,52	1.540,40
Lahan yang Terganggu – Lainnya (hektar)	171,82	203,08	2.556,59
Jumlah Lahan Terganggu- Bersih (hektar)	-133,38	23,9	2.501,93
Jumlah Pohon yang Ditanam	126.848	85.556	1.097.958

Sumber: Bapeda Kab. Tablong, 2009

men ini, pada bulan September 2008 Perusahaan menerima penghargaan yang sangat bergengsi yaitu peringkat hijau dari anugerah PROPER yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup, tingkat tertinggi yang pernah dicapai perusahaan tambang batubara Indonesia. PROPER adalah program evaluasi lingkungan yang dirancang sebagai komplemen dari Undang-undang Lingkungan sehingga peningkatan kualitas lingkungan bisa diimplementasikan secara efisien dan efektif.

Peningkatan dalam bina lingkungan PT. Adaro terjadi peningkatan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dapat terlihat pada tabel 1. Bahkan di tahun 2009 peningkatan sangat signifikan dari masing-masing kegiatan.

Sosial Budaya

Pengembangan program sosial ditujukan agar masyarakat masyarakat sekitar memiliki kesempatan untuk berekspresi dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan. Dukungan di bidang keagamaan telah dilakukan melalui kegiatan pere-majaan dan pembangunan tempat-tempat ibadah, acara-acara ibadah, dan acara-acara khusus perayaan hari-hari raya keagamaan. Dukungan di bidang olah raga telah dilakukan dengan menyediakan fasilitas olah raga dan menyelenggarakan dan mendanai kegiatan-kegiatan olah raga. Dukungan di bidang kesenian dan kebudayaan akan difokuskan pada usaha membawa kesenian dan kebudayaan lokal ke tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.

Dampak Pelaksanaan Program CSR

Keberadaan perusahaan di suatu tem-

pat sering menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di peroleh bahwa dampak tersebut di bagi kedalam 4 kategori yakni:

- (1) Konflik masyarakat dengan perusahaan. Hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar tambang di dapat suatu kesimpulan yang sering terjadi (a) Pembebasan lahan;(b) Rekrutmen tenaga kerja;(c) Peluang usaha (pemasok);(d). Limbah perusahaan;
- (2) Konflik masyarakat dengan masyarakat. Konflik yang terjadi antara sesama masyarakat sekitar lahan pertambangan pun sering terjadi. Data yang diperoleh (a) Perebutanlahan tumpang tindih; (b) Masyarakat lokal dan pendatang; (c).Kesempatan kerja;(d) Kesempatan berusaha; (e) Kecemburuan social;(f) Bantuan perusahaan yang tidak merata;
- (3) Konflik masyarakat dengan pemerintah desa. Dari hasil penelitian tampak adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa setempat. Beberapa penyebabnya adalah (a) Surat tanah yang tumpang tindih;(b) Dugaan keberpihakan Pemerintah Desa kepada perusahaan;(c) Pemberian izin penggunaan fasilitas umum seperti jalan;(d) Pembagian bantuan yang tidak adil yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (4) Konflik perusahaan dengan lingkungan. Keberadaan perusahaan tambang menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan yaitu (a) kebisingan; (b) Air minum, cuci dan mandi tercemar; (c) menciptakan lubang-lubang besar di beberapa area tambang; (d) kanyaknya

jalan yang rusak disebabkan kendaraan berat milik perusahaan; (e) hilangnya flora dan fauna di daerah tambang; (f) meningkatnya polusi debu dan (g) banjir

PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu *profit* (laba), *planet* (lingkungan) dan *pople* (masyarakat). Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana disini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana. Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan

masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. CSR tidaklah harus dipandang sebagai tuntutan represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. *Economic Sustainability* menurut *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka. PT. Adaro dalam hal ini telah melaksanakan kegiatan tersebut dilihat dari program-program yang mereka sampaikan. Dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya beberapa kegiatan telah dilakukan PT. Adaro sesuai UUPT 2007 dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Setiap kegiatan pertambangan akan terjadi dampak konflik kepentingan karena *Social Sustainability* merupakan kerjasama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka saling berinteraksi untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam implementasi program CSR di eksploitasi tambang batubara Kabupaten Tabalong terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan masyarakat. Munculnya konflik kepentingan antara warga dengan pemerintah dan pengusaha dalam eksploitasi batu bara disebabkan oleh tidak terakomodasinya kepentingan warga dalam eksploitasi batu bara. Kasus yang sama juga terjadi di-

kabupaten Karanganyar dari hasil penelitian Winarti (2011) tentang implementasi kebijakan rencana umum tata ruang kota, dimana terjadi konflik kepentingan antara masyarakat petani dengan pihak pengembang (pengusaha) dan pemerintah. Pihak pemerintah (BPN, Bappeda, Camat), pengembang dan masyarakat petani mempunyai kepentingan berbeda. BPN berkepentingan dalam pengaturan kawasan tertentu sesuai dengan tata guna lahan, Bappeda berkepentingan dalam pengembangan potensi wilayah, Camat berkepentingan dalam pemberian rekomendasi awal, pengembang berkepentingan untuk peluang bisnis dan petani mempunyai sikap pragmatis untuk menjual lahanya dengan harga tinggi. Ada dua kepentingan besar dalam implementasi kebijakan rencana umum tata ruang Kota yaitu penegakkan pengaturan rencana umum tata ruang Kota dan kepentingan yang berkembang dilapangan yaitu kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dan prospek bisnis pengembang.

Untuk mengantisipasi problem konflik kepentingan yang muncul, maka pemerintah perlu melakukan intervensi yakni melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk langkah preventif bila terjadi benturan konflik kepentingan. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan maka konflik yang terjadi sulit dikendalikan seperti yang terjadi pada penelitian Budiman (2013) mengenai kebijakan rencana tata ruang wilayah perbatasan kota dan kabupaten, dimana pemerintah tidak bertindak dalam pengaturan lahan pertanian dalam kawasan perbatasan kota dan kabupaten. Pemerintah hanya mengambil kebijakan yang bersifat membiarkan, dimana masing-masing pihak yang berkepentingan mengatur sendiri dalam mengelola lahan di wilayah perbatasan sehingga menimbulkan masalah publik yang lebih besar yaitu munculnya masalah lingkungan, hilangnya fungsi resapan tanah, banjir dan konflik sosial yang meliputi pertentangan bersama anggota masyarakat serta masyarakat dengan pihak pengembang.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) secara konseptual umumnya sudah memadai, namun pada tantangan implementasinya belum optimal. Anggaran CSR yang disediakan pihak mitra bestari (perusahaan) untuk masyarakat sekitarnya adalah meliputi pengembangan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan social budaya. Program pengembangan ekonomi masyarakat dibidang pertanian/perkebunan cukup meningkat dengan bertambahnya area perluasan lahan. Namun perluasan lahan pertanian/perkebunan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan dimana terjadi tupang tindih perebutan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sehingga timbul kecemburuan sosial. Program dibidang sosial dan budaya cukup berkembang terutama dibidang kesenian dan kebudayaan lokal dimana dapat dipromosikan ketingkat Kabupaten dan Provinsi. Program pengolahan lingkungan yang mencakup rehabilitasi lahan untuk penambangan dan operasional terminal PT. Adaro, pihak perusahaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat lokal melalui integrasi proyek lingkungan dengan program pengembangan masyarakat. Walaupun demikian dampak dari rehabilitas dilingkungan ini belum dapat diminimalkan, karena masih ditemukan beberapa pencemaran air mandi dan minum, jalan yang rusak, hilangnya flora dan fauna dan meningkatnya debu serta banjir. Dampak dari pelaksanaan program CSR adalah merupakan tanggungjawab sosial perusahaan dalam rangka membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Untuk itu pihak perusahaan harus mengevaluasi kembali rencana, program dan pelaksanaannya baik pada tantangan konsep maupun pada tantangan pelaksanaan sehingga tujuan program CSR seperti yang dikemukakan Elkington (1998) dengan konsep 3 P (Profit, Planet dan People) dapat terwujud. Pihak perusahaan tidak hanya mencari keuntungan tapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pihak pemerintah sebagai pihak pemberi otoritas, perlu melakukan intervensi dengan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. 2012. Kalimantan Selatan Dalam Angka tahun 2012.
- Budiman Widodo. 2013. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota Dengan Kabupaten. *Jurnal JI-ANA*, 12 (3).
- Elkington, J, Van Dijk, F, Delbe, C, and Terry, V. 1998. *The Social Reporting Report*. Sustainability Publication. London
- Suharto, E. 2008. "Corporate Social Responsibility: Perspektif Ilmu Sosial", makalah yang disampaikan pada seminar sehari Corporate Social Responsibility, Dinas Sosial Kota Surabaya di Hotel J.W. Marriot Surabaya, 24 April.
- Suprpto dan Siti Adipringadi Adiwoso. 2006. Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta. *Jurnal Galang*, 1 (2).
- Sulistyaningtyas, I. D. (2006). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Program Kampanye Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3 (1).
- Warta Pertanian. 2004. CSR sebagai strategi Bisnis. Dokumen. <http://www.pertamina.com/>. diakses tanggal 25 Juni 2014.
- World Business Council for Sustainable Development 2002. *Corporate Social Responsibility: The WBCSD's Journey*, pp.1. Retrieved February 1st, 2007. From <http://www.wbcsd.org>. diakses tanggal 25 Juni 2014.
- Winarti, 2011. Implementasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota. *Jurnal JIANA*, 11 (1).